

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bencana alam merupakan bentuk tragedi yang tidak dapat diprediksikan kapan akan terjadinya. Ada 2 jenis penyebab bencana yaitu, bencana yang terjadi karena faktor alam, dan bencana yang terjadi sebagai akibat perilaku manusia. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat bahwa ada 2.175 kejadian bencana di Indonesia sejak Januari hingga Desember 2017. Kejadian itu terdiri dari banjir (737 kejadian), puting beliung (651 kejadian), tanah longsor (577 kejadian), kebakaran hutan dan lahan (96 kejadian), banjir dan tanah longsor (67 kejadian), kekeringan (19 kejadian), gempa bumi (18 kejadian), gelombang pasang/abrasi (8 kejadian), serta letusan gunung api (2 kejadian).

Namun apapun penyebabnya, setiap bencana pasti akan selalu memakan korban jiwa, membawa dampak kerusakan infrastruktur dan harta benda, serta kehilangan lapangan pekerjaan. Menurut Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, kejadian bencana di Indonesia 95 persen adalah bencana hidrometeorologi, yaitu bencana yang dipengaruhi cuaca seperti banjir, tanah longsor, kekeringan, puting beling, kebakaran hutan dan lahan, dan cuaca ekstrem. BNPB mencatat jumlah korban meninggal 335 orang, korban luka-luka 969 orang, dan korban mengungsi dan menderita sebanyak 3,22 juta orang (<http://nationalgeographic.co.id> diakses pada 01 Maret 2018).

Provinsi Jawa Barat adalah daerah dengan tingkat kerawanan atau potensi bencana tertinggi di Indonesia. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Barat mencatat, selama periode Januari sampai November 2018 telah terjadi 1.399 bencana alam di Jawa Barat. Kabupaten Garut merupakan daerah yang memiliki risiko bencana nomor dua tertinggi di Jawa Barat, setelah Cianjur (<https://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/18/02/07/p3s7dz257-ini-wilayah-tertinggi-rawan-bencana-di-jawa-barat>). Kabupaten Garut telah beberapa kali mengalami bencana banjir. Yang terakhir terjadi pada Sabtu, 19/1/2019. Musibah ini akibat luapan Sungai Cimanuk menyusul hujan deras yang terus mengguyur kawasan Garut. Akibatnya, sekitar 200 lebih rumah di Kampung Cimacan, Desa Haurpanggung, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, terendam banjir setinggi 1.5 meter. Banjir bandang tersebut telah menerjang pemukiman penduduk sehingga penduduk harus dievakuasi.

Kelompok yang paling rentan terhadap trauma pasca bencana adalah perempuan dan anak-anak (Earson, 2000; Fatimah, 2008). Elaine Enarson dalam makalahnya yang berjudul "*Gender Equality, Work, and Disaster Reduction: Making the Connection*" menjelaskan bahwa konsep kerentanan merupakan konsep yang sangat kompleks. Menurutnya, kerentanan individu ketika berhadapan dengan bencana dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya adalah perbedaan akses dan kontrol terhadap sumber daya. Akses dan kontrol terhadap sumber daya dibutuhkan oleh individu untuk bertahan hidup, dan memulihkan diri dari kondisi pasca bencana.

Permasalahan gender tidak hanya membawa perempuan pada situasi yang lebih rentan ketika bencana. Permasalahan tersebut turut memengaruhi kondisi perempuan pasca bencana, yang umumnya relatif lebih rentan menjadi korban kekerasan. Selain

status gender, kondisi sosial, posisi mereka di dalam masyarakat, status pernikahan, status ekonomi, dan keyakinan yang mereka anut juga turut menjadi faktor yang meningkatkan kerentanan perempuan. Bahkan siklus menstruasi pun dapat menyumbang kerentanan tersendiri terhadap situasi yang mereka hadapi pasca bencana (UN Women, 2015). Peningkatan prevalensi kekerasan seksual berbasis gender (*Gender-Based Violence* = SGBV) dan pemaksaan perkawinan merupakan dua dari berbagai masalah ketimpangan gender yang juga mengancam perempuan dalam situasi pasca bencana (UNIFEM, 2005a; Pittaway, Bartolomei dan Rees, 2007). Oleh karena itu, kegiatan untuk menyusun profil para perempuan pasca bencana menjadi sangat penting, agar diperoleh pengetahuan atas berbagai masalah yang dihadapi dan manfaat lain untuk menurunkan risiko korban bencana.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan atas hasil studi pendahuluan secara empiric maupun kepustakaan, bahwa pada kondisi terjadinya bencana alam maupun pasca bencana, ada dugaan terjadinya kesenjangan penanganan korban berdasarkan gender. Kondisi tersebut menjadi rawan akan timbulnya kekerasan seksual berbasis gender (*Gender-Based Violence* = SGBV) di lokasi bencana maupun di lokasi penampungan sementara, yang menimpa kelompok rentan bencana, yaitu perempuan dan anak-anak. Oleh karena itu, studi tentang profil perempuan pasca bencana ini menjadi penting untuk dilaksanakan.

C. Tujuan Kegiatan

Ada beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan profil perempuan pasca bencana, yaitu:

1. Mengidentifikasi permasalahan kerentanan perempuan pasca bencana, sebagai implementasi dari pemenuhan Perlindungan Hak Perempuan (PHP).
2. Menganalisis prevalensi kekerasan seksual berbasis gender (*Gender-Based Violence = SGBV*) pada kondisi pasca bencana.
3. Mendukung implementasi PRB (Pengurangan Risiko Bencana = *Disaster Risk Reduction*).

D. Keluaran Kegiatan

1. Meningkatkan perlindungan atas hak-hak perempuan, khususnya pada kondisi pasca bencana, agar mereka mampu bangkit dan mandiri dari keterpurukan pasca bencana.
2. Meningkatkan pengetahuan dan kewaspadaan bagi perempuan akan terjadinya kekerasan seksual berbasis gender (*Gender-Based Violence = SGBV*), sebagai upaya untuk menyuarakan kesetaraan dan keadilan gender secara menyeluruh, khususnya pada pasca bencana.
3. Membantu pemerintah daerah untuk menyertakan Pengurangan Risiko Bencana (PBR = DRR = *Disaster Risk Reduction*), dalam perencanaan pembangunan mereka; dengan memperkuat program pendidikan dan kesadaran risiko bencana, dan inisiatif yang telah berhasil dalam menjaga keselamatan masyarakat.
4. Menciptakan kesadaran tentang pentingnya peran perempuan untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan berkaitan dengan penanganan pasca

bencana, sebagai upaya untuk mengatasi kesenjangan kebutuhan berdasarkan analisis gender.

E. Lingkup dan Target Kegiatan

Target atau sasaran dari kegiatan ini adalah para perempuan korban bencana banjir bandang di Kabupaten Garut pada Sabtu (19/1/2019), meliputi daerah di Kecamatan Cigedung, Desa Barusuda, Kampung Babakan Palah, Kampung Ciroyom, Kampung Barusuda, Kampung Pasir Tengah, dan Kampung Cikahuripan Desa Haurpanggung Kecamatan Tarogong Kidul.

F. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan ini akan dilaksanakan pada bulan April sampai dengan September 2019.

Adapun jadwal kegiatan meliputi:

1. Presentasi dan diskusi Kerangka Acuan Kerja dengan pihak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA).
2. Penandatanganan kontrak kerja
3. Pelaksanaan kegiatan, dan Penyusunan laporan